

EFISIENSI KERJA ORGANISASI MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan)

Ika Iuly Nopeanti¹, Ria Nelly Sari¹, dan Nasrizal¹

¹SMA BERNAS

e-mail: syfaakilah@gmail.com

History artikel	Abstrak
<p>Received: 21 Desember 2023</p> <p>Accepted: 23 Desember 2023</p> <p>Published: 25 Desember 2023</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi transaksi non tunai dan dampaknya terhadap efisiensi kerja organisasi pada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 40 OPD. Dalam penelitian ini peneliti menyebar 4 kuesioner ke setiap opd yang berjumlah 160 kuesioner. Sampel dipilih dengan menggunakan metode teknik sampel jenuh (<i>nonprobability sampling</i>) dengan responden pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara, pejabat penata keuangan dan pptk. Analisis data menggunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi <i>smart pls versi 4.0</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh komitmen organisasi, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi berpengaruh terhadap implementasi transaksi non tunai di pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Implementasi transaksi non tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi kerja organisasi. Dengan adanya implementasi transaksi non tunai, efisiensi akan menjadi kondisi yang pasti terjadi. Baik dari segi waktu, ketelitian, sampai minimnya pembiayaan karena pada dasarnya transaksi non tunai ini untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan pemerintah daerah.</p> <p>Kata Kunci: Komitmen Organisasi, Regulasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi</p> <p><i>This study aims to analyze the Factors Influencing the Implementation of Non-Cash Transactions and Its Impact on Organizational Efficiency in the Regional Government of Pelalawan Regency. The population in this study consists of all Regional Apparatus Organizations (OPDs) in Pelalawan Regency, totaling 40 OPDs. In this research, the researcher distributed 4 questionnaires to each OPD, totaling 160 questionnaires. The sample was selected using the saturated sample technique (nonprobability sampling) with respondents being Budget Users/Authorized Budget Users, Treasurers, Financial Arrangement Officers, and PPTK. Data analysis was performed using the data analysis method applied in this study, using Smart PLS version 4.0 application. he results of the study indicate that organizational commitment, regulations, human resource competency, and information technology influence the implementation of non-cash transactions in the Regional Government of Pelalawan. The implementation of non-cash transactions has a positive and significant impact on organizational efficiency.</i></p>

How to cite:	Nopeanti <i>et al.</i> (2023). Efisiensi kerja organisasi melalui transaksi non tunai (studi kasus di pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan), <i>Jurnal Rivda</i> , 1(2).
E-ISSN:	978-623-09-4976-0
Published by:	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pelalawan

With the implementation of non-cash transactions, efficiency becomes a definite condition. This is evident in terms of time, accuracy, and the minimization of financing because, fundamentally, non-cash transactions are intended to simplify and expedite the work of the regional government.

Keywords: *Organizational Commitment, Regulations, Human Resource Competency, Information Technology*

PENDAHULUAN

Pada tahap awal, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari struktur pemerintahan yang tersentralisasi menuju struktur yang terdesentralisasi. Hal ini diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kemudian diikuti oleh UU No. 32 Tahun 2004, dan yang terakhir diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya diatur oleh prinsip "*money should follow function*," yang menyatakan bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan harus diikuti oleh anggaran yang memadai untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Bahl, 2000).

Reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah menciptakan paradigma baru, yang menekankan transparansi, kebersihan, dan penerapan teknologi informasi. Pemerintah diwajibkan untuk lebih transparan dan bersih dalam mengelola keuangan daerah, dengan fokus pada digitalisasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Paradigma baru ini menuntut ketersediaan informasi data yang efisien, tepat, akurat, dan akuntabel, guna mendukung kepentingan masyarakat.

Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menetapkan tiga indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik: (1) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu, (2) tingginya penyerapan APBD, dan (3) peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan indikator tersebut, Pemerintah Daerah menerapkan transaksi nontunai sebagai langkah menuju digitalisasi. Transaksi nontunai, seperti yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mendagri No.910/1867/SJ tahun 2017, mencakup pemindahan nilai uang menggunakan instrumen seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, uang elektronik, dan sejenisnya. Dasar hukum pelaksanaan transaksi nontunai diawali dengan pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tahun 2014, dilanjutkan dengan Inpres No. 10/2016, Perpres No.82/2016, dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2019.

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi kewajiban, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai. Namun, kendati Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan telah menerapkan transaksi nontunai sejak 1 Januari 2018, terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya.

Faktor-faktor tersebut melibatkan komitmen organisasi, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Implementasi transaksi nontunai di Kabupaten Pelalawan, yang telah berlangsung selama sekitar 5 tahun, dihadapi oleh kendala-kendala baik dari internal maupun eksternal. Kendala tersebut meliputi lemahnya komitmen pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kurangnya pemahaman terkait regulasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), keterbatasan kompetensi staf, serta kendala teknis seperti gangguan server dan kurangnya fasilitas pendukung.

Dalam pendekatan Edwards III & George (1980), implementasi kebijakan efektif dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, disposisi individu, sumber daya manusia yang kompeten, dan struktur birokrasi yang efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi transaksi nontunai dan dampaknya terhadap efisiensi kerja organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Variabel utama yang dianalisis melibatkan komitmen organisasi, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Model analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami tantangan dan peluang implementasi transaksi nontunai di tingkat pemerintahan daerah.

TUJUAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi implementasi transaksi nontunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan serta mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi kerja organisasi.

METODE

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Dengan pertimbangan tertentu peneliti ingin mengetahui pengaruh komitmen organisasi, kompetensi SDM, regulasi, teknologi informasi terhadap implementasi transaksi non tunai serta efisiensi kerja organisasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 OPD. Setiap OPD sudah ditentukan sebanyak 4 orang responden yang terkait dengan variabel penelitian yaitu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Penata Keuangan dan PPTK. Jadi jumlah responden dalam penelitian ini adalah 160 orang.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS)* dengan menggunakan *software WarpPLS* versi 6.0. *Structural Equation Modeling (SEM)* adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung.

A. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan sampel data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016).

B. Pengukuran Model atau *Outer Model*

Pengukuran model atau outer model (sering juga disebut *outer relation* atau *measurement model*) mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrument (Ghozali, 2013). Dengan menggunakan WarpPLS ada tiga kriteria untuk melihat untuk melihat outer model yaitu *Convergen Validity*, *Discriminant Validity*, dan *Composite Reliability*.

1. Uji Validitas

Validitas atau kesahihan suatu instrument adalah ukuran seberapa tepat instrumen itu menghasilkan data yang sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya yang ingin di ukur. Outer model dengan indikator reflektif dengan menguji validitas konvergen (*Convergen validity*) dan validitas diskriminan (*Discriminant Validity*) (Ghozali 2013). Menurut Hair *et al.*, (2010) syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif yaitu *Outer loading* harus di atas 0,70 dan p signifikan ($<0,50$).

Dalam beberapa kasus sering syarat loading di atas 0,70 sering tidak terpenuhi khususnya untuk kuesioner yang baru dikembangkan. Oleh karena itu, loading 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan (Sholihin & Ratmono, 2013). Indikator dibawah 0,40 harus dihapus dari model. Selain melihat dengan loading factor, untuk menguji validitas konvergen dapat juga dengan melihat nilai AVE. Apabila nilai AVE yang dihasilkan semua konstruk lebih dari 0,50 maka konstruk memenuhi persyaratan validitas konvergen (Ghozali, 2013).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap valid. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program *WarpPLS 6.0*, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Apabila nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang dihasilkan $> 0,70$ (*confirmatory research*) maka semua konstruk dapat dikatakan reliabel.

C. Model Struktural atau *Inner Model*

Model struktural atau inner model menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk berdasarkan pada substantive theory.

1. *R-Square*; Dalam menilai model struktural terlebih dahulu menilai *R-Square* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai *RSquare* 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah (Ghozali, 2013).
2. *F-Square*; Uji *F-square* ini dilakukan untuk mengetahui kebaikan model. Nilai *F-square* sebesar 0,02, 0,15 dan 0,35 dapat diinterpretasikan apakah prediktor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium, atau besar pada tingkat struktural (Ghozali, 2013).
3. *Estimate For Path Coefficients*; Uji selanjutnya adalah melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi T statistik yaitu melalui metode *bootstrapping* (Ghozali, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data Penelitian

Responden penelitian ini adalah Pengguna Anggaran/PA, Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan Bendahara yang berjumlah 4 orang untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 160 orang. Pengiriman kuesioner melalui *google form* dengan waktu pengiriman kuesioner adalah 5 hari dan waktu pengisian kuesioner 2 hari kerja berdasarkan pertimbangan kecukupan waktu bagi responden untuk memahami dan mempelajari pernyataan kuesioner sebanyak 43 butir pernyataan. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Februari 2023. Persentase dari kuesioner yang disebar yaitu 100%. Hasil kuesioner yang kembali sebesar 76,87% yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat pengembalian dapat dikatakan baik (Tabel 1).

Tabel 1. Penyebaran dan Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	160	100
Kuesioner yang kembali	124	77,50
Kuesioner yang tidak kembali	36	22,50
Kuesioner yang digunakan	123	76,87
Kuesioner yang tidak digunakan	1	0,63

Sumber: Data olahan penelitian, 2023

Demografi Responden

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki, yang mendominasi peran sebagai PA/KPA, PPK, PPTK, dan Bendahara dengan proporsi sebesar 68,3%, sementara responden perempuan mencapai 31,7%. Dalam hal pendidikan, sebagian besar responden

memiliki latar belakang Sarjana (S1) dan Magister (S2), menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat pendidikan yang baik untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan PPTK di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Dari segi jabatan, Bendahara memiliki jumlah partisipasi terbanyak dalam penelitian ini, diikuti oleh PA/KPA, sementara PPK dan PPTK memiliki jumlah partisipasi yang seimbang. Ini mencerminkan distribusi peran yang beragam dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, dari kategori lama bekerja, sebagian besar responden telah berpengalaman di atas 10 tahun sebagai ASN, menunjukkan bahwa mereka memiliki pengalaman yang cukup dalam konteks pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Secara keseluruhan, gambaran ini menunjukkan bahwa dalam hal gender, pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja, para responden yang terlibat dalam fungsi pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Pelalawan memiliki karakteristik yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.

Tabel 2. Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin :		
a. Laki-Laki	84	68,3
b. Perempuan	39	31,7
Tingkat Pendidikan:		
SLTA	16	13,0
D3	9	7,3
S1	65	52,9
S2	33	26,8
Jabatan:		
PA/KPA	33	26,8
PPK	26	21,1
PPTK	26	21,1
Bendahara	38	31,0
Lama Kerja:		
1-5 Tahun	2	1,6
6-10 Tahun	12	9,8
≥ 10Tahun	109	88,6

Sumber: Data olahan penelitian, 2023

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel Implementasi Transaksi Non Tunai

Variabel Implementasi Transaksi Non Tunai ini diukur dengan 7 butir pernyataan dan setiap pernyataan diukur dengan skala 1 – 5. Hasil dari 123 tanggapan responden terhadap variabel Implementasi Transaksi Non Tunai dapat dilihat pada Tabel 3 dimana nilai minimum dan maximum antara 3 hingga 5 dengan nilai mean sebesar 3,5772 dengan standar deviasi 0,5306. Dapat dilihat nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah maka

penyebaran nilainya merata atau data yang digunakan bersifat variasi dan sampel yang digunakan dapat mewakili keseluruhan populasi.

Variabel Komitmen Organisasi

Variabel Implementasi Transaksi Non Tunai ini diukur dengan 7 butir pernyataan dan setiap pernyataan diukur dengan skala 1 – 5. Hasil dari 123 tanggapan responden terhadap variabel Implementasi Transaksi Non Tunai dapat dilihat pada Tabel 3 dimana nilai minimum dan maximum antara 3 hingga 5 dengan nilai mean sebesar 3,5772 dengan standar deviasi 0,5306. Dapat dilihat nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata atau data yang digunakan bersifat variasi dan sampel yang digunakan dapat mewakili keseluruhan populasi.

Variabel Regulasi

Variabel Regulasi ini diukur dengan 6 butir pernyataan dan setiap pernyataan diukur dengan skala 1 – 5. Hasil dari 123 tanggapan responden terhadap variabel Regulasi dapat dilihat pada Tabel 3 dimana nilai minimum dan maximum antara 2 hingga 5 dengan nilai mean sebesar 3,9431 dengan standar deviasi 0,2646. Dapat dilihat nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia ini diukur dengan 7 butir pernyataan dan setiap pernyataan diukur dengan skala 1 – 5. Hasil dari 123 tanggapan responden terhadap variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 3 dimana nilai minimum dan maximum antara 2 hingga 5 dengan nilai mean sebesar 3,5900 dengan standar deviasi 0,5830. Dapat dilihat nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata merata atau data yang digunakan bersifat variasi dan sampel yang digunakan dapat mewakili keseluruhan populasi.

Variabel Teknologi Informasi

Variabel Teknologi Informasi ini diukur dengan 9 butir pernyataan dan setiap pernyataan diukur dengan skala 1 – 5. Hasil dari 123 tanggapan responden terhadap variabel Teknologi Informasi dapat dilihat pada Tabel 3 dimana nilai minimum dan maximum antara 3 hingga 5 dengan nilai mean sebesar 3,9097 dengan standar deviasi 0,3110. Dapat dilihat nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata merata atau data yang digunakan bersifat variasi dan sampel yang digunakan dapat mewakili keseluruhan populasi.

Variabel Efisiensi Kerja Organisas

Variabel Regulasi ini diukur dengan 6 butir pernyataan dan setiap pernyataan diukur dengan skala 1 – 5. Hasil dari 123 tanggapan responden terhadap variabel Efisiensi Kerja Organisasi dapat dilihat pada Tabel 3 dimana nilai minimum dan maximum antara

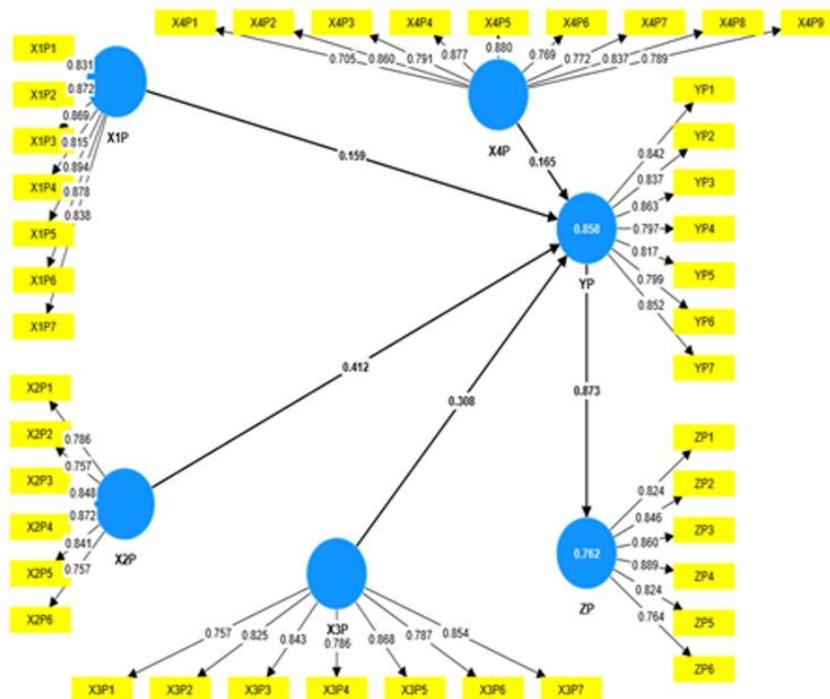
3 hingga 5 dengan nilai *mean* sebesar 3,7371 dengan standar deviasi 0,4873. Dapat dilihat nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata merata atau data yang digunakan bersifat variasi dan sampel yang digunakan dapat mewakili keseluruhan populasi.

Pengujian Inferensial

Dengan loading factor (faktor pemuatan) lebih dari 0,6 hingga 0,7, ini menunjukkan bahwa setiap indikator atau pertanyaan dalam instrumen penelitian memiliki korelasi yang kuat dengan konsep atau variabel yang diukur. Loading factor mencerminkan sejauh mana suatu indikator merepresentasikan konstruk yang diukur dalam analisis faktor. Sebuah loading factor yang tinggi menandakan bahwa indikator tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap dimensi atau konstruk tertentu yang diukur (Ghozali & Latan, 2015).

Dalam konteks ini, loading factor yang tinggi (lebih dari 0,6-0,7) membuktikan bahwa seluruh indikator atau pertanyaan dalam instrumen penelitian memiliki hubungan yang kuat dengan variabel yang diteliti (Gambar 1). Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan penghapusan data atau indikator karena semuanya berkontribusi secara signifikan terhadap analisis faktor.

Hal ini memberikan keyakinan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dapat diandalkan dan valid untuk mengukur dimensi atau konstruk yang ditetapkan. Dengan kata lain, hasil analisis faktor dapat diandalkan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan atau membuat interpretasi terkait variabel yang diukur dalam penelitian.



Gambar 1. Hasil Analisis Algoritm Loading Factor (Sumber: Data Olahan SmartPLS 4)

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standart Deviation
X1P	123	1	5	3,7201	0,4865
X2P	123	2	5	3,9431	0,2646
X3P	123	2	5	3,5900	0,5830
X4P	123	3	5	3,9097	0,3110
YP	123	3	5	3,5772	0,5306
ZP	123	3	5	3,7371	0,4873

Keterangan: X1: Komitmen Organisasi; X2: Regulasi; X3: Kompetensi SDM; X4: Teknologi informasi; Y: Implementasi Non Tunai; Z: Efisiensi Kerja Organisasi.

Sumber: Data olahan penelitian, 2023

Hasil Analisis Uji Validitas

Hasil loading factor menunjukkan nilai yang cukup tinggi untuk setiap indikator konstruk variabel, menandakan tingkat validitas konvergen yang baik. Kriteria ini sesuai dengan pandangan umum dalam penelitian, di mana nilai loading factor di atas 0,7 dianggap memenuhi standar validitas konvergen dalam penelitian konfirmatori, sementara rentang 0,6-0,7 masih dapat diterima dalam penelitian eksploratori (Hair *et al.*, 2010).

Secara khusus, analisis loading factor untuk semua konstruk variabel dalam penelitian ini telah memenuhi standar validitas konvergen, dengan nilai loading factor yang secara konsisten lebih besar dari 0,70. Pandangan ini sesuai dengan Hair *et al.* (2010), yang menyatakan bahwa nilai loading factor di atas ambang batas 0,7 menunjukkan bahwa setiap indikator dapat diandalkan dan efektif dalam mencerminkan dimensi yang diukur.

Hasil pengujian validitas konvergen pada Tabel 4 menyimpulkan bahwa semua variabel dan indikator dalam penelitian ini dapat dianggap valid dalam mengukur konstruk yang diwakilinya. Dengan nilai loading factor (faktor pemuatan) yang melebihi nilai kritis yang ditetapkan (0,7), instrumen pengukuran ini dapat diandalkan dan efektif untuk mengukur dimensi-dimensi yang terkandung dalam setiap variabel.

Validitas Diskriminan

Berdasarkan hasil pengujian validitas diskriminan pada Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Variabel strategi promosi sebagai variabel independen menunjukkan nilai loading factor yang melebihi rentang 0,6-0,7. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap variabel laten memiliki validitas diskriminan yang baik.

Dari matriks validitas diskriminan, dapat dilihat bahwa setiap elemen diagonal (diagonal utama) memiliki nilai loading factor yang lebih tinggi dibandingkan dengan elemen di luar diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel laten memiliki hubungan yang lebih kuat dengan indikator-indikator yang sejenis daripada dengan indikator-indikator dari variabel laten lainnya.

Tabel 4. Hasil Pengujian Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Variabel	Indikator	Loading Factor	Nilai Kritis	Keputusan
X1P	X1P1	0,831	0,7	Valid
	X1P2	0,872	0,7	Valid
	X1P3	0,869	0,7	Valid
	X1P4	0,815	0,7	Valid
	X1P5	0,894	0,7	Valid
	X1P6	0,878	0,7	Valid
	X1P7	0,838	0,7	Valid
X2P	X2P1	0,786	0,7	Valid
	X2P2	0,757	0,7	Valid
	X2P3	0,848	0,7	Valid
	X2P4	0,872	0,7	Valid
	X2P5	0,841	0,7	Valid
	X2P6	0,757	0,7	Valid
X3P	X3P1	0,757	0,7	Valid
	X3P2	0,825	0,7	Valid
	X3P3	0,843	0,7	Valid
	X3P4	0,786	0,7	Valid
	X3P5	0,868	0,7	Valid
	X3P6	0,787	0,7	Valid
	X3P7	0,854	0,7	Valid
X4P	X4P1	0,705	0,7	Valid
	X4P2	0,860	0,7	Valid
	X4P3	0,791	0,7	Valid
	X4P4	0,877	0,7	Valid
	X4P5	0,880	0,7	Valid
	X4P6	0,769	0,7	Valid
	X4P7	0,772	0,7	Valid
	X4P8	0,837	0,7	Valid
	X4P9	0,789	0,7	Valid
YP	YP1	0,842	0,7	Valid
	YP2	0,837	0,7	Valid
	YP3	0,863	0,7	Valid
	YP4	0,797	0,7	Valid
	YP5	0,817	0,7	Valid
	YP6	0,799	0,7	Valid
	YP7	0,852	0,7	Valid
ZP	ZP1	0,824	0,7	Valid
	ZP2	0,846	0,7	Valid
	ZP3	0,860	0,7	Valid
	ZP4	0,889	0,7	Valid
	ZP5	0,824	0,7	Valid
	ZP6	0,764	0,7	Valid

Sumber : Data Olahan SmartPLS 4.0

Penting untuk mencatat bahwa hasil ini konsisten dengan kriteria umum yang digunakan dalam penelitian. Menurut Hair *et al.* (2010), validitas diskriminan umumnya dianggap memadai jika nilai *loading factor* lebih besar dari 0,6 hingga 0,7. Oleh karena itu, temuan ini memberikan keyakinan bahwa konstruk variabel yang diukur oleh indikator-indikator memiliki kemampuan untuk secara diskriminan membedakan satu sama lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran dalam penelitian ini memiliki validitas diskriminan yang memadai.

Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

	X1P	X2P	X3P	X4P	YP	ZP
X1P1	0,831	0,602	0,601	0,455	0,628	0,659
X1P2	0,872	0,668	0,646	0,474	0,696	0,669
X1P3	0,869	0,691	0,659	0,534	0,725	0,674
X1P4	0,815	0,712	0,632	0,471	0,673	0,656
X1P5	0,894	0,753	0,626	0,509	0,739	0,773
X1P6	0,878	0,707	0,633	0,533	0,728	0,755
X1P7	0,838	0,728	0,635	0,478	0,701	0,709
X2P1	0,707	0,786	0,661	0,542	0,765	0,766
X2P2	0,595	0,757	0,631	0,369	0,655	0,684
X2P3	0,696	0,848	0,631	0,455	0,705	0,692
X2P4	0,643	0,872	0,682	0,485	0,739	0,750
X2P5	0,666	0,841	0,639	0,549	0,736	0,729
X2P6	0,636	0,757	0,549	0,533	0,681	0,645
X3P1	0,495	0,522	0,757	0,412	0,596	0,482
X3P2	0,649	0,617	0,825	0,419	0,693	0,636
X3P3	0,666	0,718	0,843	0,494	0,746	0,649
X3P4	0,586	0,715	0,786	0,369	0,701	0,652
X3P5	0,608	0,655	0,868	0,406	0,699	0,629
X3P6	0,584	0,567	0,787	0,358	0,619	0,596
X3P7	0,625	0,650	0,854	0,424	0,685	0,671
X4P1	0,293	0,310	0,306	0,705	0,392	0,293
X4P2	0,501	0,571	0,417	0,860	0,568	0,493
X4P3	0,493	0,557	0,404	0,791	0,550	0,576
X4P4	0,496	0,531	0,453	0,877	0,577	0,460
X4P5	0,507	0,531	0,440	0,880	0,585	0,526
X4P6	0,477	0,472	0,402	0,769	0,535	0,473
X4P7	0,487	0,466	0,443	0,772	0,531	0,448
X4P8	0,478	0,481	0,423	0,837	0,543	0,390
X4P9	0,435	0,449	0,373	0,789	0,512	0,502
YP1	0,726	0,799	0,713	0,570	0,842	0,731
YP2	0,665	0,701	0,653	0,563	0,837	0,744
YP3	0,686	0,713	0,743	0,543	0,863	0,734
YP4	0,641	0,712	0,699	0,543	0,797	0,642
YP5	0,624	0,715	0,691	0,549	0,817	0,645
YP6	0,628	0,676	0,617	0,527	0,799	0,670
YP7	0,756	0,795	0,706	0,550	0,852	0,877
ZP1	0,768	0,809	0,657	0,548	0,769	0,824
ZP2	0,687	0,751	0,646	0,472	0,746	0,846
ZP3	0,677	0,743	0,628	0,455	0,718	0,860
ZP4	0,769	0,764	0,675	0,546	0,810	0,889
ZP5	0,562	0,677	0,591	0,390	0,662	0,824
ZP6	0,606	0,645	0,587	0,457	0,653	0,764

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4

Penggunaan *Average Variance Extracted* (AVE) dalam pengujian validitas konvergen adalah langkah yang tepat. Berdasarkan hasil estimasi AVE pada Tabel 6, dapat disimpulkan bahwa konstruk penelitian ini memiliki nilai validitas konvergen yang baik. Nilai AVE untuk setiap variabel X1P, X2P, X3P, X4P, YP, dan ZP melebihi nilai ambang batas yang diterima, yaitu 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah dari varian indikator-indikator yang terkandung dalamnya, secara rata-rata.

Penting untuk dicatat bahwa nilai AVE yang tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar varians dari indikator-indikator yang terukur oleh setiap variabel laten telah dijelaskan dengan baik oleh variabel laten tersebut. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa konstruk variabel dalam penelitian ini memiliki validitas konvergen yang memadai.

Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah Pengukuran dengan metode *Fornell-Larcker* yang dilakukan dengan membandingkan *square roots* atas AVE dengan korelasi vertical laten (Fornell dan Larcker, 1981). Validitas diskriminan dikatakan baik apabila *square root* atas AVE sepanjang garis diagonal lebih besar korelasinya antara satu konstruk dengan yang lainnya. Berikut pengukuran dengan metode *Fornell-Larcker*:

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai *square root* atas AVE sepanjang garis diagonal lebih besar korelasinya antara satu konstruk dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki tingkat validitas yang baik, sehingga diharapkan mampu memberikan ketepatan dan kecermatan serta ketidak biasan pada hasil penelitian.

Tabel 6. Hasil Pengujian Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE)	
X1P	0,735
X2P	0,658
X3P	0,669
X4P	0,657
YP	0,689
ZP	0,698

Sumber : Data Olahan SmartPLS 4.0

Tabel 7. Hasil Pengujian Kriteria Fornell-Larcker

	X1P	X2P	X3P	X4P	YP	ZP
X1P	0,857					
X2P	0,801	0,811				
X3P	0,739	0,781	0,818			
X4P	0,577	0,605	0,505	0,811		
YP	0,816	0,815	0,807	0,661	0,830	
ZP	0,817	0,818	0,757	0,576	0,815	0,835

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4.0

Hasil Analisis Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengukuran Tabel 8, nilai *composite reliability* dari setiap konstruk memiliki nilai lebih besar dari 0.7 sehingga semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi syarat *discriminant reliability*. Pada *cronbach's alpha* nilai yang disarankan adalah diatas 0.6 dan pada Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk semua konstruk berada diatas 0.6. Apabila suatu konstruk telah memenuhi dari kriteria tersebut maka dapat dikatakan bahwa konstruk realibel atau memiliki konsistensi dalam instrument penelitian.

Uji Struktural Model (*Inner Model*)

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh nilai R Square Implementasi transaksi non tunai (Y)P sebesar 0,858. Artinya adalah sebesar 85,8% variabel Implementasi transaksi non tunai (YP) dipengaruhi oleh Komitmen Organisasi (X1P), Regulasi (X2P), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3P) dan Teknologi Informasi (X4P) dan sisanya sebesar 14,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Sedangkan variabel Efisiensi Kerja Organisasi (ZP) dipengaruhi secara tidak langsung oleh Komitmen Organisasi (XP1), Regulasi (X2P), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3P), Teknologi Informasi (X4P) dan variabel Efisiensi Kerja Organisasi (ZP) dipengaruhi langsung melalui variabel Implementasi transaksi non tunai (YP) sebesar 0,762 atau setara 76,2%.

Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Pada hipotesis Kedua (H1) secara statistic diterima dengan *p-value* yang signifikan sebesar *p-value* = 0,010 ($\leq 0,05$), maka hipotesis diterima dan H0 ditolak. Hasil Pengujian Dalam Tabel 10 model struktural dapat dilihat bahwa variabel Komitmen Organisasi (X1P) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai (YP) dengan nilai *p-value* 0.010 Nilai *path coefficient* sebesar 0.159, menunjukkan bahwa setiap kenaikan Komitmen Organisasi (X1P) sebesar 1 satuan, maka variabel Implementasi Transaksi Non Tunai (YP) akan meningkat sebesar 0.159 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

Tabel 8. Quality Criteria (Cronbach's Alpha dan Composite Reliability)

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Standard Reliable	Keterangan
X1P	0,940	0,941	0,7	Reliable
X2P	0,895	0,897	0,7	Reliable
X3P	0,917	0,920	0,7	Reliable
X4P	0,934	0,938	0,7	Reliable
YP	0,925	0,927	0,7	Reliable
ZP	0,913	0,917	0,7	Reliable

Sumber: Data Olahan SmartPLS 4

Tabel 9. Hasil Nilai R-Square

	R-square	R-square adjusted
YP	0,858	0,853
ZP	0,762	0,760

Somber: Data Olahan SmartPLS 4.0

Tabel 10. Direct Effect (Mean, STDEV, T-Values)

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1P -> YP	0,159	0,162	0,062	2,579	0,010
X2P -> YP	0,412	0,406	0,074	5,562	0,000
X3P -> YP	0,308	0,307	0,065	4,716	0,000
X4P -> YP	0,165	0,170	0,063	2,623	0,009
YP -> ZP	0,873	0,874	0,020	43,281	0,000

Sumber : Data Olahan SmartPLS 4.0

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Pada hipotesis Kedua (H2) secara statistic diterima dengan *p-value* yang signifikan sebesar *p-value* = 0,000 ($\leq 0,05$), maka hipotesis diterima dan H0 ditolak. Hasil Pengujian Dalam Tabel 10 model struktural dapat dilihat bahwa variabel Regulasi (X2P) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai (YP) dengan nilai *p-value* 0.000 Nilai *path coefficient* sebesar 0.412, menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Regulasi (X2P) sebesar 1 satuan, maka variabel Implementasi Transaksi Non Tunai (YP) akan meningkat sebesar 0.412 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Pada hipotesis Ketiga (H3) secara statistik diterima dengan *p-value* yang signifikan sebesar *p-value* = 0.000 ($\leq 0,05$), Hasil Pengujian Dalam Tabel 10 model struktural dapat dilihat bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3P) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Implementasi Transaksi Non Tunai (YP) dengan nilai *p-value* 0.000 Nilai *path coefficient* sebesar 0.308 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3P) sebesar 1 satuan, maka Implementasi Transaksi Non Tunai (YP) akan meningkat sebesar 0.308 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Pada hipotesis Ketiga (H4) secara statistik diterima dengan *p-value* yang signifikan sebesar *p-value* = 0.009 ($\leq 0,05$), maka hipotesis diterima dan H0 ditolak. Hasil Pengujian Dalam Tabel 10 model struktural dapat dilihat bahwa variabel Teknologi Informasi (X4P) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variable Implementasi Transaksi Non Tunai (YP) dengan nilai *p-value* 0.009 Nilai *path coefficient* sebesar 0.165, menunjukkan bahwa setiap kenaikan Teknologi Informasi (X4P) sebesar 1 satuan, maka Implementasi Transaksi Non Tunai (YP) akan meningkat sebesar 0.165 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil Pengujian Hipotesis Kelima (H5)

Pada hipotesis Ketiga (H5) secara statistik diterima dengan *p-value* yang signifikan sebesar *p-value* = 0.000 ($\leq 0,05$), maka hipotesis diterima dan H0 ditolak. Hasil

Pengujian Dalam Tabel 10 model struktural dapat dilihat bahwa variabel Implementasi Transaksi Non Tunai (YP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Efisiensi Kerja Organisasi (ZP) dengan nilai p-value 0.000 Nilai *path coefficient* sebesar 0.873, menunjukkan bahwa setiap kenaikan Implementasi Transaksi Non Tunai (YP) sebesar 1 satuan, maka Efisiensi Kerja Organisasi (ZP) akan

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menggambarkan bahwa komitmen organisasi, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi informasi berperan krusial dalam implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Tingginya komitmen organisasi, didukung oleh regulasi yang jelas, dan sumber daya manusia yang kompeten, memberikan dampak positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi transaksi non tunai. Teknologi informasi yang memadai juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi, menciptakan efisiensi kerja organisasi.

Dengan implementasi transaksi non tunai, efisiensi kerja dapat ditingkatkan, seiring dengan keterlibatan aktif para pelaksana yang memiliki pemahaman mendalam terhadap kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan pandangan komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi transaksi non tunai dan dampaknya terhadap kinerja organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, R. W. (2009). *China: Evaluating the impact of intergovernmental fiscal reform*. In R. M. Bird & F. Vaillancourt (Eds.), *Fiscal decentralization in developing countries*. Cambridge University Press.
- Edward III, & George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington: Cogressional Quarerterly Inc
- Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Model Persamaan Struktural dengan Variabel Tak Terobservasi dan Kesalahan Pengukuran: Aljabar dan Statistik. *Jurnal Riset Pemasaran*, 18, 382-388. <http://dx.doi.org/10.2307/3150980>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Sholihin, M. & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0 (Ed.1)*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. ISBN 979-8433-71-8.